

Penentuan Prioritasi Penanganan Akses Air Minum pada Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah

Wahyu Ramadhani Sukma Lestari¹, Nurwi Mayasri Fitri Astuti²

Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Info Artikel

Diterima : 3 September 2024
Direvisi : 11 September 2024
Disetujui : 24 Oktober 2024

Kata kunci:

Air Minum
Indeks Ketahanan Sosial
Kemiskinan Ekstrem

Keywords:

Drinking water
Social Resilience Index
Extrem Poverty

Corresponding Author:
Wahyu Ramadhani Sukma Lestari
Wrs1@students.undip.ac.id
085866182750

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dilihat dari berbagai dimensi, salah satunya adalah akses air minum. Ketersediaan air minum memiliki dampak secara tidak langsung terhadap kemiskinan suatu desa, semakin besar persentase ketersediaan akses air minum di suatu desa menunjukkan bahwa desa tersebut terlayani oleh akses air minum dari pemerintah. Dalam penetapan status desa, air minum menjadi salah satu indikator pembentuk Indeks Ketahanan Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah skoring dan pembobotan data status Indeks Desa Membangun (IDM) dengan data jumlah penduduk yang telah menerima akses air minum pada Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Metode tersebut digunakan untuk menentukan prioritas penanganan akses air minum. Prioritas penanganan terbagi dalam 3 klasifikasi (prioritas penanganan I, II, dan III). Semakin rendah tingkat persentase ketersediaan air minum makasemakin tinggi tingkat prioritas penanganannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengentaskan permasalahan desa prioritas PKE berdasarkan ketersediaan air minum.

Abstract

Poverty is a social problem that is seen from various dimensions, one of which is access to drinking water. The availability of drinking water has an indirect impact on the poverty of a village, the greater the percentage of availability of access to drinking water in a village indicates that the village is served by access to drinking water from the government. In determining the status of a village drinking water is one of the indicators in forming the Social Resilience Index in determining village status. The method used in this study is scoring and weighting Developing Village Index (IDM) with data on the number of residents who have received access to drinking water in priority villages for extreme poverty alleviation (PKE). This method is used to determine priorities for handling drinking water access. Treatment priorities are divided into 3 classifications (priority handling I, II, and III). The lower the percentage level of drinking water availability, the higher priority level for intervention. The results of this study are expected to serve as a reference for the government in alleviating the problems of PKE priority villages based on the availability of drinking water.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan kompleks yang ditinjau dari berbagai aspek sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia dan termuat pada SDG's tujuan I (satu). Kemiskinan merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu negara, angka kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut belum sejahtera (Faujan and Agustina, 2024). Adapun kemiskinan ekstrem merupakan situasi ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi layak, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hingga ketidakmampuan dalam mendapatkan akses informasi dan akses layanan sosial (United Nation, 1996). Kata "ekstrem" pada kemiskinan ekstrem merujuk pada situasi kemiskinan yang sangat parah yang menggambarkan bahwa masyarakat tidak memiliki akses yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal tersebut menjadi permasalahan yang menyebabkan ketimpangan pada suatu daerah (Mansur, 2024). Dengan kata lain, kemiskinan ekstrem merupakan keadaan dimana suatu daerah ataupun seseorang tidak dapat meningkatkan standar hidup menjadi lebih baik sehingga tidak mencapai kehidupan yang layak.

Dalam kurun waktu 2023, persentase masyarakat miskin ekstrem di Provinsi Jawa

Tengah turun 0,87% menjadi sebesar 1,1% (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem gencar ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, terdapat 3 strategi utama penanggulangan kemiskinan yaitu Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, Peningkatan Pendapatan Masyarakat, dan Penurunan Wilayah Kantong Kemiskinan.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam menangani penurunan wilayah kantong kemiskinan adalah dengan pemenuhan pelayanan dasar pada desa kemiskinan ekstrem. Terpenuhinya pelayanan dasar pada wilayah kemiskinan yang dapat dilihat pada status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan alat ukur yang dipakai dalam mengetahui perkembangan pedesaan (STIT, Kusuma and Purwanti, 2018). IDM menjadi alat pemetaan pembangunan desa dan berfungsi sebagai alat bantu untuk mengukur kemandirian suatu desa dari nilai komposit masing-masing indikator, yaitu Indeks Ketahanan Lingkungan, Indeks Ketahanan Sosial, dan Indeks Ketahanan Ekonomi. Nilai IDM menunjukkan kondisi desa yang makin berkembang menurut aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan. IDM merupakan rujukan

dalam menuntaskan permasalahan desa miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu indikator yang berpengaruh dalam penetapan nilai IDM adalah Akses Ketersediaan Saluran Air minum. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, pemerintah perlu menyediakan air minum yang dapat dikonsumsi dan bersih serta dapat dijangkau oleh semua kalangan (Sukartini & Samsubar, 2016). Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, terkait Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum melalui pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kab/kota di Jawa Tengah. Meskipun persentase akses air minum di Jawa Tengah sudah mencapai 88,27%, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut apakah akses air minum tersebut sudah terjangkau hingga ke pedesaan terutama pada desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem atau belum.

Penyediaan air minum menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta peningkatan kualitas lingkungan. Air minum merupakan

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah bagi seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya akses terhadap air minum dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja serta menimbulkan permasalahan kesehatan. Secara tidak langsung, tidak adanya akses air minum menjadi penyebab kemiskinan (Yesi and Juairiyah, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prioritas penanganan ketersediaan akses air minum pada desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah melalui scoring dan pembobotan variabel status IDM dengan variabel jumlah penduduk penerima akses air minum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menangani permasalahan penyediaan akses air minum pada desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara pengumpulan data asli lalu dianalisis sehingga menunjukkan skema terkait suatu masalah (Purnamasari, Hayati and Statistika, 2018). Unit yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 102 desa, dengan batasan berupa status IDM dengan

Jumlah Penduduk Penerima Akses Air Minum. Adapun analisis yang digunakan dalam prioritas penanganan akses air minum adalah scoring dan pembobotan status IDM dengan data jumlah penduduk yang telah menerima akses air minum menggunakan *software* Microsoft Excel. Teknik scoring merupakan teknik pemberian scoring pada tiap variabel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (Sholikhan, Prasetyo and Hartomo, 2019). Adapun teknik pembobotan adalah teknik pengambilan proses yang melibatkan beberapa variabel dengan cara memberi bobot pada tiap variabel tersebut (Fitria and Wibawa, 2021). Teknik scoring dan pembobotan ini dilakukan untuk menyusun prioritas penanganan akses air minum pada desa PKE. Hasil dari scoring dan pembobotan selanjutnya akan divisualisasikan menggunakan peta untuk menunjukkan

persebaran prioritas penanganan akses air minum pada Desa PKE di Jawa Tengah (Saepudin, Suharsono and Chalid, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan nilai scoring dan pembobotan

Dalam menentukan prioritas penanganan akses air minum pada desa PKE, dilakukan cara scoring dan pembobotan dari variabel Status Indeks Desa Membangun dengan varibel Jumlah Penduduk Penerima Akses Air Minum. Semakin tinggi status Indeks Desa Membangun maka akan semakin tinggi scoringnya, begitu pula dengan variabel Jumlah Penduduk Penerima Akses Air Minum. Adapun sebaliknya, semakin kecil Status Indeks Desa Membangun maka akan semakin kecil pula scoring yang didapat (Muzaki *et al.*, 2022). Berikut ini merupakan tabel perumusan nilai scoring dan pembobotannya.

Tabel 1. Deskripsi Skoring Status IDM dengan Penerima Akses Saluran Air Minum

Variabel	Deskripsi
Status Indeks Desa Membangun	Semakin tinggi status indeks membangun, semakin tinggi scoring nilainya
Penerima Akses Saluran Air Minum	Semakin tinggi penerima akses air minum, semakin tinggi scoring nilainya.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Masing-masing variabel akan diberikan bobot sesuai dengan kondisi eksisting. Tiap variabel diberikan bobot 50% yang memberikan arti bahwa II variabel memiliki pengaruh yang sama dalam

penentuan prioritas penanganan akses air minum pada desa PKE. Adapun penentuan dari pembobotan masing masing parameter dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. Pembobotan Status IDM dengan Penerima Akses Saluran Air Minum

Variabel	Bobot
Status Indeks Desa Membangun	50%
Penerima Akses Saluran Air Minum	50%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Setelah ditentukan bobot pada masing-masing variabel, tahap selanjutnya adalah menetukan nilai skor pada tiap variabel. Skoring yang dilakukan memiliki *range* 1-5 pada tiap variabel. Berikut rincian skor pada tiap variabel

Tabel 3. Skoring Status IDM dengan Penerima Akses Saluran Air Minum

Variabel	Deskripsi	Kelas	Skoring
Status Indeks Desa Membangun	Semakin tinggi status indeks membangun, semakin tinggi bobot nilainya	Desa Sangat Tertinggal Desa Tertinggal Desa Berkembang Desa Maju Desa Mandiri	1 2 3 4 5
Penerima Akses Saluran Air Minum	Semakin tinggi penerima akses air minum, semakin tinggi bobot nilainya.	$\leq 20\%$ 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% $\geq 80\%$	1 2 3 4 5

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Penentuan Pemberian Skoring dan Pembobotan pada Variabel

Penentuan prioritas penanganan akses air minum dapat diketahui melalui hasil skoring dan pembobotan yang telah dilakukan. Hasil skoring 2 variabel selanjutnya akan dijumlahkan. Berikut ini adalah penilaian terhadap masing-masing variabel.

Tabel 4. Perhitungan Skoring Status IDM dengan Penerima Akses Saluran Air Minum

No	Kabupaten	Desa/Kelurahan	Status IDM	Skoring IDM	Penerima SAM (Jiwa)	Skoring SAM	Total Skoring
1	Banyumas	Klapagading Kulon	Desa Mandiri	4	11.391	5	9
2	Banyumas	Krajan	Desa Maju	3	4.300	4	7
3	Banyumas	Tumiyang	Desa Berkembang	3	3.790	4	7
4	Banyumas	Pekuncen	Desa Berkembang	3	302	1	4

No	Kabupaten	Desa/Kelurahan	Status IDM	Skoring IDM	Penerima SAM (Jiwa)	Skoring SAM	Total Skoring
5	Banyumas	Karangkemiri	Desa Maju	3	2.125	2	5
6	Banyumas	Panusupan	Desa Maju	3	6.424	4	7
7	Banyumas	Karangtengah	Desa Berkembang	3	11.210	5	8
8	Banyumas	Gununglurah	Desa Maju	3	5.625	4	7
9	Banyumas	Sokawera	Desa Maju	3	7.867	5	8
10	Banyumas	Dawuhan Wetan	Desa Mandiri	4	3.839	4	8
11	Banjarnegara	Gumelem Kulon	Desa Maju	3	3.101	2	5
12	Banjarnegara	Wanadri	Desa Berkembang	3	3.182	4	7
13	Banjarnegara	Wiramastra	Desa Maju	3	2.340	4	7
14	Banjarnegara	Pucang	Desa Mandiri	3	6.612	5	8
15	Banjarnegara	Tanjungtirta	Desa Maju	4	3.359	4	8
16	Banjarnegara	Punggelan	Desa Maju	3	1.107	1	4
17	Banjarnegara	Bondolharjo	Desa Mandiri	3	4.176	4	7
18	Banjarnegara	Gumingsir	Desa Berkembang	3	1.253	4	7
19	Banjarnegara	Plumbungan	Desa Berkembang	3	352	1	4
20	Banjarnegara	Karangsari	Desa Maju	4	4.682	5	9
21	Banjarnegara	Biting	Desa Maju	3	163	1	4
22	Banjarnegara	Darmayasa	Desa Mandiri	3	3.216	4	7
23	Banjarnegara	Penusupan	Desa Maju	3	1.575	2	5
24	Kebumen	Kemangguan	Desa Maju	3	2.832	4	7
25	Kebumen	Karangkembang	Desa Maju	4	1.843	3	7
26	Kebumen	Kalibeji	Desa Mandiri	3	1.524	2	5
27	Kebumen	Kedungwringin	Desa Maju	3	2.213	4	7
28	Kebumen	Somagede	Desa Berkembang	3	2.693	4	7
29	Kebumen	Karanggayam	Desa Mandiri	3	2.110	4	7
30	Kebumen	Plumbon	Desa Maju	3	1.384	2	5
31	Kebumen	Kalisana	Desa Berkembang	3	3.547	5	8
32	Pemalang	Plakaran	Desa Berkembang	3	2.146	2	5
33	Pemalang	Badak	Desa Maju	2	968	1	3
34	Pemalang	Mendelem	Desa Maju	3	13.937	5	8
35	Pemalang	Beluk	Desa Mandiri	3	7.691	4	7
36	Pemalang	Majalangu	Desa Mandiri	3	1.475	1	4
37	Pemalang	Majakerta	Desa Maju	3	5.273	5	8
38	Pemalang	Wanarata	Desa Maju	4	3.144	2	6
39	Pemalang	Pabuaran	Desa Maju	4	892	2	6
40	Pemalang	Pegundan	Desa Maju	3	9.710	4	7
41	Brebes	Bangbayang	Desa Berkembang	3	2.082	2	5
42	Brebes	Pengarasan	Desa Mandiri	4	2.082	2	6
43	Brebes	Waru	Desa Berkembang	3	3.748	5	8
44	Brebes	Negla	Desa Maju	3	16.372	5	8

No	Kabupaten	Desa/Kelurahan	Status IDM	Skoring IDM	Penerima SAM (Jiwa)	Skoring SAM	Total Skoring
45	Brebes	Cipelem	Desa Maju	2	321	1	3
46	Brebes	Kamal	Desa Berkembang	3	12	1	4
47	Brebes	Ketanggungan	Desa Mandiri	3	910	1	4
48	Brebes	Buara	Desa Berkembang	3	270	1	4
49	Brebes	Bulakelor	Desa Maju	3	270	1	4
50	Banyumas	Randegan	Desa Maju	3	5.733	4	7
51	Banyumas	Klapagading	Desa Mandiri	3	11.391	5	8
52	Banyumas	Banteran	Desa Mandiri	3	4.219	4	7
53	Banyumas	Losari	Desa Maju	3	7.521	5	8
54	Banyumas	Sidamulih	Desa Maju	3	4.347	4	7
55	Banyumas	Tipar	Desa Maju	3	5.739	5	8
56	Banyumas	Cikembulan	Desa Berkembang	4	1.762	2	6
57	Banyumas	Langgongsari	Desa Maju	3	4.041	3	6
58	Banyumas	Kutaliman	Desa Berkembang	3	3.683	4	7
59	Banjarnegara	Berta	Desa Mandiri	3	489	1	4
60	Banjarnegara	Derik	Desa Maju	3	2.490	3	6
61	Banjarnegara	Gumelem Wetan	Desa Maju	4	8.580	5	9
62	Banjarnegara	Kebondalem	Desa Berkembang	4	1.852	3	7
63	Banjarnegara	Sambong	Desa Maju	4	4.100	4	8
64	Banjarnegara	Sokaraja	Desa Berkembang	3	2.105	5	8
65	Banjarnegara	Pagentan	Desa Maju	4	3.371	4	8
66	Banjarnegara	Babadan	Desa Berkembang	3	3.225	5	8
67	Kebumen	Kalijaya	Desa Maju	3	1.974	3	6
68	Kebumen	Seliling	Desa Berkembang	3	2.239	2	5
69	Kebumen	Wonokromo	Desa Maju	3	2.873	3	6
70	Kebumen	Tunjungseto	Desa Mandiri	3	2.706	3	6
71	Kebumen	Sampang	Desa Maju	4	1.986	2	6
72	Kebumen	Kalirejo	Desa Maju	3	3.059	5	8
73	Kebumen	Logandu	Desa Maju	4	3.778	4	8
74	Kebumen	Kebakalan	Desa Berkembang	4	2.911	5	9
75	Kebumen	Wonotirto	Desa Maju	3	2.110	4	7
76	Kebumen	Seboro	Desa Maju	3	5.465	4	7
77	Kebumen	Wonosari	Desa Maju	3	2.063	4	7
78	Kebumen	Sadangkulon	Desa Maju	3	2.898	5	8
79	Kebumen	Cangkring	Desa Maju	3	1.621	5	8
80	Kebumen	Kedunggong	Desa Tertinggal	3	1.587	4	7
81	Kebumen	Wadasmalang	Desa Maju	3	3.448	3	6
82	Kebumen	Tlepok	Desa Berkembang	3	1.027	3	6
83	Kebumen	Karangsambung	Desa Maju	4	4.960	5	9
84	Pemalang	Mandiraja	Desa Berkembang	3	3.115	2	5

No	Kabupaten	Desa/Kelurahan	Status IDM	Skoring IDM	Penerima SAM (Jiwa)	Skoring SAM	Total Skoring
85	Pemalang	Walangsanga	Desa Berkembang	3	2.203	2	5
86	Pemalang	Sima	Desa Maju	3	1.237	1	4
87	Pemalang	Gendoang	Desa Maju	3	2.014	2	5
88	Pemalang	Kuta	Desa Maju	3	6.028	3	6
89	Pemalang	Gunungjaya	Desa Maju	3	2.797	2	5
90	Pemalang	Tlagasana	Desa Berkembang	3	1.269	1	4
91	Pemalang	Tundagan	Desa Berkembang	3	2.001	2	5
92	Pemalang	Cawet	Desa Maju	3	1.027	2	5
93	Pemalang	Serang	Desa Maju	3	6.283	4	7
94	Pemalang	Kalirandu	Desa Mandiri	4	1.822	1	5
95	Pemalang	Panjunan	Desa Maju	4	2.412	3	7
96	Pemalang	Klareyan	Desa Maju	4	488	1	5
97	Pemalang	Nyamplungsari	Desa Mandiri	3	4.736	4	7
98	Brebes	Cinanas	Desa Maju	3	1.057	4	7
99	Brebes	Pangebatan	Desa Mandiri	3	1.494	1	4
100	Brebes	Rengaspendawa	Desa Mandiri	2	242	1	3
101	Brebes	Wlahar	Desa Maju	4	1.861	1	5
102	Brebes	Siandong	Desa Maju	3	1.016	1	4

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Penentuan Prioritas Penanganan Ketersediaan Akses Air Minum

Setelah mengetahui total skoring dari II variabel, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas untuk penanganan ketersediaan akses air minum bagi desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Langkah penentuannya adalah

membuat kelas pada masing-masing pembobotan dan mengklasifikasikannya dalam urutan penanganan. Berikut merupakan tabel penentuan prioritas penanganan berdasarkan hasil total skoring variabel status IDM dengan variabel penerima akses air minum.

Tabel 5. Penentuan Kelas Status IDM dengan Penerima Akses Saluran Air Minum

Total Pembobotan	Kelas	Prioritas Penanganan
	≤ 5	Prioritas Penanganan I
	≤ 7	Prioritas Penanganan II
	≤ 9	Prioritas Penanganan III
	> 9	Akses Air Minum di atas 80%

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Berdasarkan hasil pembobotan diatas diketahui terdapat 3 prioritas penanganan ketersediaan air minum bagi desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Hasil dari pembobotan tersebut

kemudian di visualisasikan melalui peta untuk melihat persebaran prioritas penanganan ketersediaan air minum dan menganalisis kecenderungan persebarannya.



Gambar 1 Peta Persebaran Prioritas Penanganan Akses Air Minum Desa PKE Jawa Tengah

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Peta diatas menunjukkan persebaran desa PKE yang menjadi prioritas penanganan dalam ketersediaan air minum. Hasil dari peta memperlihatkan 3 (tiga) tingkat prioritas penanganan, yaitu Prioritas Penanganan I, Prioritas Penanganan II, dan Prioritas Penanganan III. Peta di atas juga menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes

merupakan wilayah yang paling banyak memiliki desa yang menjadi Prioritas Penanganan I dalam penanganan ketersediaan air minum (ditunjukkan oleh warna merah). Adapun rincian desa PKE beserta prioritas penangannya akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 6. Daftar Desa PKE sesuai dengan Tingkat Prioritas Penanganan Akses Saluran Air Minum

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Prioritas Penanganan
Banjarnegara	Bawang	Wanadri	Prioritas Penanganan I
		Wiramastra	Prioritas Penanganan II
		Pucang	Prioritas Penanganan II
	Pagentan	Kebondalem	Prioritas Penanganan III
		Plumbungan	Prioritas Penanganan I

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Prioritas Penanganan
Banyumas	Pejawaran	Babadan	Prioritas Penanganan I
		Sokaraja	Prioritas Penanganan II
		Pagentan	Prioritas Penanganan II
		Gumingsir	Prioritas Penanganan III
		Penusupan	Prioritas Penanganan I
	Punggelan	Biting	Prioritas Penanganan I
		Darmayasa	Prioritas Penanganan II
		Karangsari	Prioritas Penanganan III
		Tanjungtirta	Prioritas Penanganan I
		Punggelan	Prioritas Penanganan II
Brebes	Susukan	Sambong	Prioritas Penanganan II
		Bondolharjo	Prioritas Penanganan III
		Gumelem Kulon	Prioritas Penanganan III
		Gumelem Wetan	Prioritas Penanganan III
		Berta	Prioritas Penanganan III
	Cilongok	Derik	Prioritas Penanganan III
		Sokawera	Prioritas Penanganan I
		Langgongsari	Prioritas Penanganan I
		Karangtengah	Prioritas Penanganan II
		Gununglurah	Prioritas Penanganan II
Jawa Tengah	Kedungbanteng	Panusupan	Prioritas Penanganan III
		Dawuhan Wetan	Prioritas Penanganan II
		Kutaliman	Prioritas Penanganan III
		Krajan	Prioritas Penanganan II
		Karangkemiri	Prioritas Penanganan II
	Pekuncen	Tumiyang	Prioritas Penanganan III
		Cikembulan	Prioritas Penanganan III
		Pekuncen	Prioritas Penanganan III
		Losari	Prioritas Penanganan II
		Tipar	Prioritas Penanganan II
Jawa Tengah	Rawalo	Sidamulih	Prioritas Penanganan III
		Wangon	Prioritas Penanganan II
		Klapagading	Prioritas Penanganan II
		Randegan	Prioritas Penanganan II
		Banteran	Prioritas Penanganan II
	Bantarkawung	Klapagading Kulon	Prioritas Penanganan III
		Bangbayang	Prioritas Penanganan I
		Pangebatan	Prioritas Penanganan I
		Pengarasan	Prioritas Penanganan II
		Cinanas	Prioritas Penanganan II
Jawa Tengah	Bulakamba	Waru	Prioritas Penanganan III
		Cipelem	Prioritas Penanganan I
		Ketanggungan	Prioritas Penanganan I
		Buara	Prioritas Penanganan I
		Bulakelor	Prioritas Penanganan I
	Larangan	Kamal	Prioritas Penanganan I
		Rengaspendawa	Prioritas Penanganan I
		Wlahar	Prioritas Penanganan I
			Prioritas Penanganan I

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Prioritas Penanganan
Kebumen	Losari	Siandong	Prioritas Penanganan I
		Negla	Prioritas Penanganan III
		Seliling	Prioritas Penanganan I
		Kemangguan	Prioritas Penanganan II
		Karangkembang	Prioritas Penanganan II
	Karanggayam	Kalijaya	Prioritas Penanganan II
		Wonokromo	Prioritas Penanganan II
		Karanggayam	Prioritas Penanganan II
		Wonotirto	Prioritas Penanganan II
		Kalirejo	Prioritas Penanganan III
Pemalang	Karangsambung	Logandu	Prioritas Penanganan III
		Kebakalan	Prioritas Penanganan III
		Plumbon	Prioritas Penanganan I
		Wadasmalang	Prioritas Penanganan II
		Tlepok	Prioritas Penanganan II
	Sadang	Kalisana	Prioritas Penanganan III
		Karangsambung	Prioritas Penanganan III
		Wonosari	Prioritas Penanganan II
		Kedunggong	Prioritas Penanganan II
		Sehoro	Prioritas Penanganan II
Pemalang	Sempor	Sadangkulon	Prioritas Penanganan III
		Cangrking	Prioritas Penanganan III
		Kalibeji	Prioritas Penanganan I
		Kedungwringin	Prioritas Penanganan II
		Somagede	Prioritas Penanganan II
	Bantarbolang	Tunjungseto	Prioritas Penanganan II
		Sampang	Prioritas Penanganan II
		Wanarata	Prioritas Penanganan II
		Pabuaran	Prioritas Penanganan II
		Badak	Prioritas Penanganan I
Pemalang	Belik	Gunungjaya	Prioritas Penanganan I
		Beluk	Prioritas Penanganan II
		Kuta	Prioritas Penanganan II
		Mendelem	Prioritas Penanganan III
		Plakaran	Prioritas Penanganan I
	Moga	Mandiraja	Prioritas Penanganan I
		Walangsanga	Prioritas Penanganan I
		Sima	Prioritas Penanganan I
		Gendoang	Prioritas Penanganan I
		Kalirandu	Prioritas Penanganan I
Pemalang	Petarukan	Klareyan	Prioritas Penanganan I
		Pegundan	Prioritas Penanganan II
		Serang	Prioritas Penanganan II
		Nyamplungsari	Prioritas Penanganan II
		Panjunan	Prioritas Penanganan II
	Watukumpul	Majalangu	Prioritas Penanganan I
		Tlagasana	Prioritas Penanganan I

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Prioritas Penanganan
		Tundangan	Prioritas Penanganan I
		Cawet	Prioritas Penanganan I
		Majakerta	Prioritas Penanganan III

Sumber: Analisis Penulis, 2024

SIMPULAN

Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan sosial yang perlu segera dihapuskan oleh pemerintah. Di Provinsi Jawa Tengah kemiskinan ekstrem ditemukan di 102 desa/kelurahan yang tersebar pada 5 kab/kota. Penuntasan kemiskinan perlu dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dengan standar hidup yang layak, salah satunya dengan penyediaan akses air minum. Dalam upaya membantu pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan maka dilakukan penentuan prioritas penanganan akses air minum pada desa PKE menggunakan skoring dan pembobotan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui urutan desa yang menjadi prioritas penanganan dalam penyediaan akses air minum. Hasil analisis menunjukkan terdapat 34 desa PKE yang menjadi Prioritas Penanganan I dalam ketersediaan akses air minum, 42 desa PKE sebagai Prioritas Penanganan II, dan 26 desa PKE yang menjadi Prioritas Penanganan III dalam ketersediaan akses air minum.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan antara Indeks Desa Membangun dengan variabel penyediaan akses air minum terhadap desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem maka menghasilkan saran sebagai berikut:

1. Perlunya ketersediaan dan keterbaruan data ketersediaan akses air minum dari pihak pemerintah agar mempermudah dalam analisis serta mengurangi adanya anomali data;
2. Pemerintah dalam menangani akses air minum pada Desa PKE dapat memprioritaskan desa yang masuk dalam Prioritas I, II, dan III;
3. Selain melakukan penanganan akses air minum pada Prioritas I, II, dan III, dapat dipertimbangkan juga untuk melakukan tindakan preventif pada desa yang sudah mendapatkan akses air minum diatas 80% dengan melakukan pengawasan kualitas air untuk memastikan air yang telah disediakan aman untuk dikonsumsi, pemeliharaan infrastruktur, serta melakukan konservasi sumber daya air untuk mencegah penurunan kualitas

- dan ketersediaan air dalam jangka waktu lama;
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pengambil kebijakan untuk mengembangkan strategi yang yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan desa PKE dengan penyediaan akses air minum.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun*. Jakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2022. *SOP Update Data Indeks Desa Membangun Tahun 2022*. Jakarta
- Muzaki, A.N. *et al.* (2022) 'Pemetaan Potensi Banjir dengan Metode Skoring Secara Geospasial di Kecamatan Bumiaji Kota Batu', *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 7(2), p. 267–284. DOI: <https://doi.org/10.24815/jpg.v7i2.28663>.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Faujan, L.O. dan Agustina, N. 2023. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Kemiskinan Ekstrem Rumah Tangga di Provinsi Maluku Tahun 2021*. Prosiding Seminar Nasional Official Statistics 2023 (p. 343–352). Politeknik Statistika STIS.
- Fitria, N.D. dan Wibawa, A.P. (2021). Sistem Pembobotan Berdasarkan Teknik Analisis Korelasi untuk Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Metode SAW. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(3), p. 1116. DOI: <http://dx.doi.org/10.30865/mib.v5i3.3080>.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Kesehatan. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum*. Jakarta.
- Mansur, Yuwarman. (2024). Analisis Perkembangan Penduduk Miskin, Karakteristik Kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan di Indonesia.

- Jurnal EMT KITA, 8(1), p. 18-31. DOI: 15.2.1727.
<https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.1930>.
- Muhtarom, Nurhadi K. dan Eri P. (2018) 'Village Index Analysis Building to Know The Village Development in Gadingrejo District of Pringsewu District', *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 6(02), pp. 179–190. DOI: <https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.96>
- Purnamasari, I. dan Hayati, M.N. (2018) Analisis Deskriptif pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Siswa untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Tingkat Perguruan Tinggi. *Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang*, 6(2), p. 114-118. DOI: <https://doi.org/10.26714/jsunimus.6.2.2018.%25p>.
- Saepudin, H., Suharsono, T.N. dan Chalid, A. (2022) Penentuan Skoring dan Pembobotan pada Parameter Ruas Jalan untuk Sistem Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bandung berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Techno-Sosio Ekonomika*, 15(2), pp. 130–144. DOI: <https://doi.org/10.32897/techno.2022.16>
- Sholikhan, M., Sri YJP, dan Kristoko DH. (2019) Pemanfaatan WebGIS untuk Pemetaan Wilayah Rawan Longsor Kabupaten Boyolali dengan Metode Skoring dan Pembobotan, *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 5(1), pp. 131–143. DOI: <https://doi.org/10.28932/jutisi.v5i1.1588>
- Sukartini, N. M., & Samsubar, S. (2016). Akses Air Bersih di Indonesia Access to Clean Water in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), 89–98. DOI: <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v09.i02.p01>
- United Nations. (1996). Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem. diakses pada tanggal 2 Desember 2022 melalui <https://pendampingdesa.com/>.
- Yesi, D. dan Juairiyah, O. (2021) Sebaran tingkat Kemiskinan dan Tingkat Akses Air Bersih di Sumatera Selatan. *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, 8 (1), pp. 11–16. DOI: <https://doi.org/10.31258/dli.8.1.p.11-16>